

**UJI MODEL PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH MELALUI *GOOD GOVERNANCE*, PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI DAN PENGENDALIAN INTERN
(STUDI PADA OPD KABUPATEN SEMARANG)**

Lisa Erfi Yunita dan Agung Wibowo

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

*Kampus I : Jl. Pawiyatan Luhur Bendan Duwur Semarang 50233. Telp. (024)8316187 Fax.
(024)8316193*

Kampus II : Jl. Imam Bonjol No.161. Tel. (024) 3510803 Semarang 50131

Email: lisayunita73@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *simple random sampling*. Populasi penelitian ini adalah 45 instansi OPD Kabupaten Semarang dengan unit penelitian yaitu pegawai bagian akuntansi/ keuangan.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan survei kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good governance* dan pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Semarang. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah OPD Kabupaten Semarang.

Kata Kunci : *Governance, Teknologi, Pengendalian Intern, Laporan Keuangan*

PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah disebutkan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan

informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional

pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mempunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonomi daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan *good governance* (Darise, 2008: 2). Berdasarkan hal tersebut dalam rangka memperkuat akuntabilitas, setiap pejabat yang menyajikan laporan keuangan diharuskan memberi pernyataan tanggung jawab atas laporan keuangan. Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus secara jelas menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan informasi yang termuat pada laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Darise, 2008: 2).

PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki diantaranya relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Haryanto, dkk., 2007: 261).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2012 s.d. 2016 Kabupaten Semarang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal tersebut menggambarkan entitas pemerintah daerah yang baik dalam menyajikan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Pembuatan laporan keuangan adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami (Elvira, 2011). Menurut penelitian Karmila, dkk. (2014) bahwa pembuatan laporan keuangan tidak lepas dari pemanfaatan teknologi, karena pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Selain itu, sistem pengendalian intern dalam laporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah.

Beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Elvira, 2011) yang menyatakan bahwa penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian (Ika dan Nur, 2015). Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Fadila, 2013) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sejalan dengan penelitian (Warih, 2015). Namun, berbeda dengan hasil penelitian (Dian dan Akhmad, 2014) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan dan sistem pengendalian intern mempunyai pengaruh positif tidak signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Penelitian (Karmila, dkk., 2015) bahwa pengendalian intern berpengaruh positif tidak signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, begitu pula dengan hasil penelitian (Siti, dkk., 2017) yang menyatakan teknologi informasi memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap informasi laporan keuangan. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dengan apakah *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan pada OPD Kabuapten Semarang.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakteristik kualitatif laporan keuangan diantaranya adalah relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah antara lain *good governance*, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern.

1. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan interaksi yang konstruktif diantara domain-domain. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Demi hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas yang tepat, jelas, dan nyata, sehingga penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggungjawab. Adanya penerapan *good governance*, maka diharapkan pemerintah dapat menghasilkan laporan

keuangan yang berkualitas sebagai bentuk dari penyelenggaraan anggaran dan tujuan pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara *good governance* dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Elvira (2011) dan Ika dan Nur (2015) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan *good government governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Terdapat pengaruh positif signifikan *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang).

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pemanfaatan teknologi akan sangat membantu dalam proses pengolahan data transaksi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human error*. Teknologi informasi, khususnya komputer digunakan sebagai pendukung pembuatan laporan keuangan, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada penjelasan tersebut diduga terdapat

hubungan positif antara penggunaan teknologi informasi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Seperti halnya penelitian Warih (2016) dan Karmila, dkk. (2015) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Terdapat pengaruh positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang).

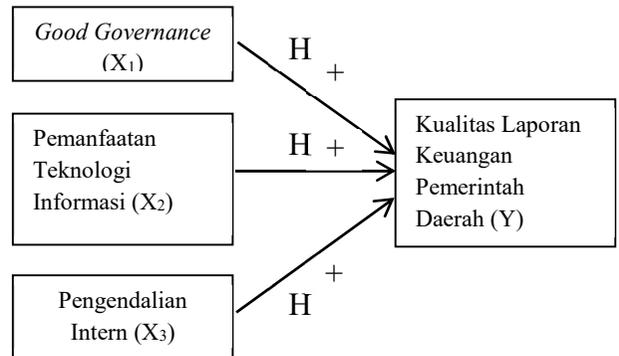
3. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

PP No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian intern tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian intern yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut,

sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki sistem informasi akuntansi yang handal. Jika tidak ada sistem akuntansi yang handal menyebabkan lemahnya pengendalian intern (*internal control*) pemerintah daerah, sehingga sistem pencatatan dan pelaporan akuntansinya kurang handal. Berdasarkan uraian tersebut diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Fadila (2013) dan Warih (2016) menyatakan bahwa pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Terdapat pengaruh positif signifikan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi pada OPD Kabupaten Semarang).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran pengaruh *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka diringkas dalam dalam gambar di bawah ini :



Uji Model Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui *Good Governance*, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Semarang yang berjumlah 45 instansi OPD. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik survei dengan bantuan kuesioner sejumlah 100 kuesioner yang dibagikan. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada OPD Kabupaten Semarang yang berjumlah 100 pegawai, dan data yang terkumpul sebanyak 82 kuesioner.

2. Variabel dan Pengukuran Variabel

a. *Good Governance* (X₁)

World Bank mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 24). Variabel *good governance* diukur dengan Skala Likert lima poin, yaitu skor 1 (Sangat Tidak Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden menilai adanya pencapaian *good governance* sangat rendah, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan bahwa responden menilai adanya pencapaian *good governance* yang sangat tinggi. Variabel *good governance* (X1) dioperasionalkan dengan 10 indikator yang mengacu pada penelitian Elvira (2011), yaitu terdiri dari :

1. Keterbukaan
2. keuangan
3. Pengambilan keputusan yang demokratis
4. Kebebasan pers
5. Kebebasan berpendapat
6. Keterlibatan masyarakat
7. Menilai pertanggungjawaban Pelaporan

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X₂)

Menurut ITTA (*Information Technology Association of America*), teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak komputer. Pemanfaatan teknologi membantu dalam proses pengolahan data

transaksi sehingga laporan keuangan yang dihasilkan terbebas dari kesalahan material yang disebabkan oleh *human eror*. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah serta dapat menyampaikan informasi keuangan daerah kepada publik (Karmila, dkk., 2015).

Variabel penggunaan teknologi informasi (X₂) diukur menggunakan Skala Likert lima poin. Skor 1 (Sangat Tidak Setuju) mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi tergolong sangat rendah, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan bahwa penggunaan teknologi tergolong sangat tinggi. Variabel ini dioperasionalkan dengan menggunakan delapan indikator yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008) yang terdiri dari :

1. Kecukupan jumlah komputer yang ada dan tersedia.
2. Jaringan internet sudah terpasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.
3. Proses akuntansi dilakukan secara komputerisasi.
4. Pegawai Pemerintahan mampu membuat laporan keuangan secara komputerisasi.
5. Adanya software pendukung.
6. Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur.
7. Adanya perbaikan peralatan tepat waktu.

c. Pengendalian Intern (X₃)

PP No. 60 Tahun 2008, bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Variabel pengendalian intern (X3) diukur menggunakan Skala Likert lima poin. Skor 1 (Sangat Tidak Setuju) mengindikasikan bahwa adanya pengendalian intern yang sangat rendah, dan skor 5 (Sangat Setuju) mengindikasikan adanya pengendalian intern yang sangat tinggi. Variabel ini dioperasionalkan dengan menggunakan sembilan indikator yang mengacu pada penelitian Indriasari dan Nahartyo (2008), yang sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, diantaranya :

1. Sistem akuntansi yang ada.
2. Adanya dokumen pendukung.
3. Adanya otorisasi pihak yang berwenang.
4. Adanya bukti transaksi yang sah.
5. Pencatatan pembukuan.
6. Catatan akuntansi up to date.
7. Adanya review dan persetujuan laporan keuangan.
8. Sistem akuntansi yang memungkinkan audit.
9. Adanya pemisahan tugas.
10. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (Darise, 2008: 49). Laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Variabel ini diukur dengan menggunakan Skala Likert lima poin, dimana skor 1 (Sangat Tidak Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden mengungkapkan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang memiliki kualitas sangat buruk, sedangkan skor 5 (Sangat Setuju) yang mengindikasikan bahwa responden mengungkapkan adanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang sangat baik. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) dioperasionalkan dengan 7 indikator yang mengacu pada Indriasari dan Nahartyo (2008). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu:

1. Penyajian setiap fakta informasi dalam laporan keuangan secara jujur.
2. Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang dapat diverifikasi.
3. Penyajian informasi dalam laporan keuangan yang diarahkan pada

kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan tertentu.

4. Peraturan Menteri Keuangan Badan Layanan Umum yaitu berkaitan dengan penyajian Neraca.
5. Penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
6. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. Adanya Rekonsiliasi secara periodik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji Validitas

Uji validitas menggunakan *Corrected Item – Total Correlation* dengan alat bantu program SPSS, yaitu dengan membandingkan r_{tabel} dan r_{hasil} . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam taraf 95% atau $\alpha = 0,05$. Apabila nilai $r_{hasil} > r_{tabel}$ maka instrumen tersebut dinyatakan valid, r_{tabel} untuk $N=82$ adalah 0,217. Hasil pengujian dapat dilihat nilai terendah *Corrected Item – Total Correlation* dari masing-masing instrumen. *Good governance* nilai terendah 0,281, pemanfaatan teknologi informasi nilai terendah 0,441, pengendalian intern nilai terendah 0,234, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah nilai terendah 0,630.

Uji Reliabilitas

Pengujian terhadap item-item yang valid menggunakan alat ukur dengan teknik uji reliabilitas *Cronbach Alpha* dari masing-masing instrumen yang dikatakan reliabel lebih besar dari 0,6. Hasil penelitian menunjukkan nilai *Cronbach Alpha*

variabel *good governance* 0,780, pemanfaatan teknologi informasi 0,870, pengendalian intern 0,861, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,912.

2. Uji Non Respon Bias

Uji non respon bias dilakukan dengan tujuan untuk menguji adanya persamaan/perbedaan jawaban antara kuesioner yang terkumpul dengan kuesioner yang tidak kembali. Uji ini dilakukan menggunakan *Independent Sample T-Test* dengan melihat bahwa nilai *Sig. (2-tailed) > 0,05*. Hasil uji non respon bias dengan asumsi nilai varians sama variabel *good governance* nilai *Sig. (2-tailed) 0,147*, pemanfaatan teknologi informasi 0,560, pengendalian intern 0,664, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah 0,786. Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa tidak terdapat perbedaan antara jawaban kuesioner yang terkumpul dengan jawaban yang tidak terkumpul.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan memperhatikan signifikansi uji statistik nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov Test > $\alpha = 0,05$* didapat hasil nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) 0,218*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data terdistribusi dengan normal.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Model regresi yang dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance > 0,10*. Hasil penelitian didapat nilai *tolerance* variabel *good*

governance, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF menunjukkan kurang dari 10, maka data-data dalam penelitian ini dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Good Governance	.688	1.454
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.585	1.708
Pengendalian Intern	.555	1.801

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

Uji Heterokedastisitas

Salah satu cara melihat adanya heterokedastisitas adalah dilakukan uji *Glejser*, apabila nilai Sig. > 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas. Dari hasil pengolahan data seluruh variabel independen menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.673	1.986		.339	.735
	Good Governance	-.047	.070	-.090	-.664	.508
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.057	.055	.152	1.039	.302
	Pengendalian Intern	.015	.061	.036	.242	.809

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data yang telah diolah, 2018

5. Uji Goodness of Fit (Uji Model)

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai R square 0,481 atau 48,1% artinya kemampuan model untuk menjelaskan variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebesar 48,1% sedangkan sisanya 51,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Nilai signifikansi F test adalah 0,000 (sig. < 0,05), dengan demikian model regresi adalah fit sehingga layak digunakan sebagai alat analisis

**Hasil Uji Goodness of Fit
Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.693 ^a	.481	.461	2.393

a. Predictors: (Constant), Pengendalian Intern, Good Governance, Pemanfaatan Teknologi Informasi

6. Uji Hipotesis

Alat untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda *Ordinary Least Square (OLS)* dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) menggunakan program SPSS.

Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
Model		Standardized		t	Sig.
		Unstandardized Coefficients	Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.380	3.077	1.423	.159
	Good Governance	.342	.109	.310	.002
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-.050	.086	-.062	.564
	Pengendalian Intern	.449	.094	.521	.000

a. Dependent Variable: Kualitas

Sumber : Data yang diolah, 2018

Berdasarkan pengolahan data dapat dirumuskan persamaan regresi linier berganda, yaitu :

$$Y = 4,380 + 0,342X_1 - 0,050X_2 + 0,449X_3 + e$$

a. Hipotesis 1

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel *good governance* (X_1) $0,002 < \alpha 0,05$ dan nilai $\beta_1 = 0,342$ bertanda positif. Dapat disimpulkan bahwa *good governance* (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.

b. Hipotesis 2

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel pemanfaatan teknologi informasi (X_2) sebesar $0,564 > \alpha 0,05$ dan nilai $\beta_2 = (-0,050)$ bertanda negatif. Dapat dinyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi (X_2) berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan pernyataan tersebut maka H_0 diterima dan H_2 ditolak.

c. Hipotesis 3

Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai signifikansi variabel pengendalian intern (X_3) $0,000 < \alpha 0,05$ sedangkan nilai $\beta_3 = 0,449$ bertanda positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengendalian intern (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Berdasarkan pernyataan tersebut maka H_0 ditolak dan H_3 diterima.

PEMBAHASAN

a. Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama, ditemukan adanya bukti yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara *good governance* terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Semarang. Artinya semakin baik penerapan *good governance*, maka akan semakin meningkat kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Adanya *good governance* dilihat dari penerapan prinsip pengelolaan daerah yang baik seperti transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas. Pemerintah Kabupaten Semarang melakukan transparansi dan akuntabilitas keuangan atas pengelolaan keuangan daerah dengan cara publikasi laporan keuangan tahunan secara rutin agar publik dapat mengetahui kinerja yang telah dicapai dan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Selain itu, juga didukung dengan adanya prinsip responsibilitas yakni adanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi yang telah disusun sebelumnya berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga terwujudnya kualitas LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diaudit oleh inspektorat wilayah Kabupaten Semarang yang kemudian setiap tahunnya akan diaudit oleh

BPK RI perwakilan Jawa Tengah untuk mendapatkan opini atas LKPD satu periode pelaporan akuntansi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ika Maya Sari dan Nur Arvah Tamrin (2015) dan penelitian Siti Nurohmi, dkk. (2017) yang menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

b. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengujian hipotesis kedua diperoleh hasil bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Semarang. Hal tersebut menunjukkan adanya kenaikan penggunaan teknologi informasi tidak meningkatkan kualitas laporan keuangan secara tidak signifikan.

Teknologi informasi khususnya komputer, digunakan sebagai pendukung pembuatan laporan keuangan agar terbebas dari kesalahan material yang disebabkan *human error*, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien. Namun, pada hasil penelitian ini variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak sejalan dengan teori tersebut sehingga tidak berakibat pada meningkatnya kualitas laporan keuangan. Hal tersebut karena teknologi informasi yang ada di beberapa kantor dinas belum dimanfaatkan secara optimal serta beberapa

pegawai bagian akuntansi kurang memahami penggunaan software data transaksi keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Riduwan (2014) yang mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan.

c. Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, dapat dinyatakan bahwa variabel pengendalian intern mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada OPD Kabupaten Semarang. Hal tersebut berarti semakin tinggi kepatuhan OPD dalam pengendalian intern, maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan akan semakin meningkat. Pengendalian intern memiliki pengaruh paling besar dalam model penelitian ini, dibuktikan dengan nilai koefisien regresi yang paling tinggi diantara ketiga variabel independen yaitu 0,449 sehingga adanya pengendalian intern yang baik berpengaruh besar dalam peningkatan kualitas LKPD Kabupaten Semarang.

Pengendalian intern digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu tugas dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Komponen pengendalian intern akan menjaga sistem informasi dari kesalahan-kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Pengendalian

intern (*internal control*) pemerintah daerah yang kuat, akan menghasilkan sistem pencatatan yang valid dan pelaporan akuntansi yang handal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fadila Ariesta (2013) dan penelitian Warih Komarasari (2016) yang menyatakan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini mengenai pengaruh variabel independen yaitu *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap variabel dependen kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Variabel *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Variabel pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kinerja *good governance* dan pengendalian intern pada OPD Kabupaten Semarang, sehingga akan menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang lebih baik dan dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan BPK RI Jawa Tengah.
2. Penyediaan sarana teknologi informasi lebih optimal dan pegawai bagian akuntansi lebih memahami penggunaan software data transaksi keuangan yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, Dian Tri dan Akhmad Riduan. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi. Vol. 3, No.3.
- Ariesta, Fadila. 2013. *Pengaruh Kualitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)*. *Jurnal Akuntansi*.
- Azlim. Darwanis dan Usman Abu Bakar. 2012. *Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD Di Kota Banda Aceh*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No.1.
- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. Jakarta: PT Indeks.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multifariate dengan Program IBM SPSS.19*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto. Sahmuddin dan Arifudin. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- [http://Beta.bandungkab.go.id>public>uploads \(9 Oktober 2017\).](http://Beta.bandungkab.go.id>public>uploads (9 Oktober 2017).)
- [http://eprints.uny.ac.id/19845/3/BAB%20II.pdf \(9 Oktober 2017\).](http://eprints.uny.ac.id/19845/3/BAB%20II.pdf (9 Oktober 2017).)
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern \(15 Oktober 2017\).](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_intern (15 Oktober 2017).)
- [http://Pusat-studi-kebijakan-publik.blogspot.com \(10 November 2017\).](http://Pusat-studi-kebijakan-publik.blogspot.com (10 November 2017).)
- [http://Repository.upi.edu/11478/6/S_PEA_1005751_Chapter%203.pdf \(15 November 2017\).](http://Repository.upi.edu/11478/6/S_PEA_1005751_Chapter%203.pdf (15 November 2017).)
- [http://Theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/uji-goodness-of-fit-uji.html \(4 Desember 2017\).](http://Theorymethod.blogspot.co.id/2015/12/uji-goodness-of-fit-uji.html (4 Desember 2017).)
- [http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf \(16 Oktober 2017\).](http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf (16 Oktober 2017).)
- [http://www.spssindonesia.com/2016/08/ca-ra-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html \(04 Desember 2017\).](http://www.spssindonesia.com/2016/08/ca-ra-melakukan-uji-f-simultan-dalam.html (04 Desember 2017).)

<http://tutorial-spss-statistika.blogspot.co.id>
(25 Februari 2018)

Indriasari, D dan Nahartyo, E. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir)*. Simposium Nasional Akuntansi, XI, Pontianak, Juli.

Karmila, Amries Rusli Tanjung dan Edfan Darlis. 2015. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. *Jurnal SOROT*. Vol.9, No.1.

Komarasari, Warih. 2016. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*. *Jurnal Akuntansi*.

Nurohmi, Siti, Sutrisno & Zaki Baridwan. 2017. *The Determinant of Financial Statements-Content Information: Corporate Governance as a Mediating Variable*. *Journal of Accounting and Business Education*. Vol.1, No.2.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

PP Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual*.

Sani, Abdul. 2016. *Implementasi Good Governance pada Pemerintah Daerah*. (Badan Pendidikan dan Pelatihan).Bandiklat.babelprov.go.id>2016/11/30 diakses pada 9 November 2017.

Sari, Ika Maya. Nur Arvah Tamrin. 2015. *Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. hal. 106-121.

Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Bumi Aksara. <http://www.pengertianpakar.com/2015/02/pengertian-fungsi-dan-tujuan-teknologi-informasi.html>. (01/11/2017).

Zeyn, Elvira. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*. Vol.1, No. 1.